

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 1,25% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,48% (yoy). Selain itu, capaian inflasi tahunan tersebut juga masih lebih rendah dibandingkan triwulan II pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 2,48% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, laju inflasi Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat juga lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 1,33% (yoy), namun masih lebih tinggi dibandingkan inflasi yang terjadi di kawasan Jawa (1,20%; yoy). Melambatnya inflasi Jawa Tengah tersebut juga sejalan dengan tren menurunnya tekanan harga yang berlangsung di tingkat nasional maupun di kawasan Jawa. Dengan perkembangan tersebut, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan inflasi terendah keempat di kawasan Jawa pada triwulan laporan. Selanjutnya perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting mengindikasikan adanya kenaikan harga yang tidak setinggi pada periode sebelumnya. Kelompok komoditas hortikultura masih menjadi pendorong kenaikan harga kebutuhan pokok, diantaranya adalah cabai merah dan cabai rawit. Kedua komoditas tersebut tercatat mengalami inflasi masing-masing sebesar 19,40% (yoy) dan 43,42% (yoy). Ke depan risiko inflasi yang perlu menjadi perhatian adalah seiring dengan peningkatan kasus Covid-19 akan berimplikasi pada peningkatan level PPKM dan berpotensi mengganggu distribusi dan pasokan barang kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi intensif di seluruh kab/kota untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan penting.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Penurunan tekanan inflasi triwulanan Jawa Tengah pada triwulan laporan utamanya disumbangkan oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, serta Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mencatatkan inflasi tahunan sebesar 1,22% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 2,05% (yoy). Kelompok ini memiliki pangsa $\pm 25\%$ dari total Nilai Konsumsi Jawa Tengah, sehingga tren penurunan inflasinya dapat menahan inflasi Jawa Tengah. Meredanya tekanan harga kelompok ini terutama masih berlangsung pada bulan April-Mei 2021, didorong oleh stabilnya pasokan komoditas pangan dan hortikultura seiring dengan pulihnya pasokan produksi pertanian, baik di Jawa Tengah maupun di wilayah pusat produksi lainnya. Selanjutnya, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan juga terhitung menjadi kelompok kontributor penurunan inflasi Jawa Tengah pada triwulan ini. Deflasi tahunan kelompok ini tercatat sebesar -1,73% (yoy), menurun lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -0,84% (yoy). Walaupun pangsa Nilai Konsumsinya relatif kecil terhadap total konsumsi masyarakat Jawa Tengah ($\pm 4,7\%$), namun tren penurunan indeks harganya yang telah berlangsung sejak triwulan II 2020 berdampak terhadap pembentukan inflasi Jawa Tengah. Penurunan tekanan harga pada kelompok komoditas ini terutama disumbangkan oleh komoditas telepon seluler serta biaya pulsa ponsel.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan strategis, TPID Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pada April 2021, yaitu: • Rapat Teknis Terkait Kesiapan TPID Selama Periode PPKM □ TPID Jawa Tengah telah melakukan rapat teknis bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Daerah guna membahas kesiapan infrastruktur pemasaran, logistik, dan keamanan transportasi barang-barang, khususnya pada

periode PPKM. • Koordinasi Program Serap Gabah (SERGAB) □ Telah dilakukan koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perum Bulog, serta PD Citra Mandiri Jawa Tengah terkait program Serap Gabah (SERGAB). □ Program SERGAB merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi yang bertujuan untuk menyerap gabah hasil panen yang terkendala kadar air yang tinggi. • Pemanfaatan Data pada Aplikasi Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) □ Pemanfaatan data neraca produksi pangan pada aplikasi Sistem Logistik Daerah yang meliputi volume produksi dan stok perdagangan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, untuk pengambilan keputusan intervensi pasar murah oleh Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. 2. Kegiatan TPID Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada Mei dan Juni 2021, yaitu: • Pembaharuan Data pada Aplikasi SISLOGDA □ Telah dilakukan pembaharuan data, terutama data stok di tingkat petani, pedagang, distributor, dan importir pada aplikasi SISLOGDA. • Pemanfaatan Gudang Pemerintah Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional □ Pemanfaatan gudang-gudang Pemerintah Daerah oleh para pelaku usaha, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) serta Badan Usaha Milik Petani (BUMP) untuk melakukan penyimpanan pasokan produk pertanian terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. • Koordinasi Langkah-langkah Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok □ TPID Jawa Tengah berkoordinasi dengan distributor utama untuk memastikan penerapan harga jual yang wajar, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Dalam forum ini sekaligus dilakukan pemantauan ketersediaan dan kelancaran distribusi produk-produk impor utama, seperti bawang putih dan gula pasir ke berbagai daerah di Jawa Tengah. □ TPID Jawa Tengah berkoordinasi untuk penyelenggaraan pasar online yang dikembangkan kabupaten/kota, kemudian mempublikasikan informasi tersebut ke seluruh masyarakat Jawa Tengah. □ TPID Jawa Tengah melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pedagang untuk belanja bijak dan tidak menimbun bahan pokok dalam jumlah besar. □ Berkoordinasi dengan forum petani champion cabai dan bawang merah se-Jawa Tengah agar memaksimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat. • Rekonsiliasi Data pada Aplikasi SISLOGDA □ TPID Jawa Tengah melakukan rekonsiliasi data pada aplikasi SISLOGDA. □ Selain itu, TPID Jawa Tengah juga melakukan pemantauan secara berkala terkait pengembangan kelembagaan petani dan penerapan sistem resi gudang terhadap BUMP PT. Pengayom Tani Sejad. • Perluasan Implementasi SISLOGDA □ Telah dilakukan perluasan implementasi aplikasi SISLOGDA pada kabupaten/kota yang dilakukan oleh PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (BUMD). □ Selanjutnya, PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah juga bekerja sama dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PERSERO) guna mengatur distribusi pangan di Jawa Tengah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sejauh ini implementasi kebijakan pengendalian inflasi di Jawa Tengah berjalan cukup efektif. Hal ini tercermin pada Inflasi tahunan pada triwulan laporan terpantau sebesar 1,25% (yoy), atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2021 yang tercatat sebesar 1,48% (yoy). Penurunan tekanan inflasi pada triwulan laporan juga berlangsung pada seluruh kota pantauan di Jawa Tengah dengan intensitas yang relatif seragam. Capaian inflasi terendah pada triwulan laporan berlangsung pada Kota Purwokerto yang mencatatkan angka sebesar 1,02% (yoy), sementara inflasi tertinggi terjadi di Kota Surakarta yang mencatatkan angka sebesar 1,73% (yoy). Ditinjau berdasarkan kelompoknya, perkembangan inflasi di kota-kota pantauan menunjukkan perkembangan yang relatif seragam. Pada triwulan ini, seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mencatatkan penurunan tekanan harga yang signifikan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Sumber penurunan ini terutama berlangsung pada bahan pangan utama, khususnya komoditas beras dan cabai merah. Secara keseluruhan,

perkembangan inflasi tahunan pada seluruh kota pantauan di Jawa Tengah sejalan dengan tren di kawasan Jawa maupun di tingkat nasional, yaitu mencatatkan penurunan tekanan inflasi tahunan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a Berperan aktif dalam memantau ketersediaan dan kelancaran distribusi produk-produk barang kebutuhan pokok dan penting seiring dengan potensi peningkatan kembali level PPKM seiring dengan peningkatan kasus covid-19 b Melakukan komunikasi efektif agar masyarakat tidak panic buying apabila pemerintah kembali meningkatkan level PPKM c Meningkatkan peran BUMD dan BUMS untuk mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan gudang-gudang Pemerintah Daerah untuk menyimpan pasokan produk pertanian. d Melakukan penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan daya tawar petani. e Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan secara berkala terkait pengembangan kelembagaan petani dan penerapan sistem resi gudang melalui aplikasi SISLOGDA.